

ABSTRAK

Angga Permana : Kebijakan Politik Wakil Presiden Mohammad Hatta pada masa Revolusi Kemerdekaan RI (1945-1949).

Wakil Presiden Mohammad Hatta merupakan salah seorang dari dua proklamator kemerdekaan Indonesia. Betapapun ada semangat dan peranan tokoh-tokoh lain dalam mendirikan Republik ini, kepercayaan utama diberikan kepada Soekarno dan Hatta. Peran keduanya memang dimulai pada masa-masa sulit menjelang proklamasi kemerdekaan, serta beberapa tahun sesudahnya. Soekarno pun pada waktu itu bagai tak dapat berbuat tanpa Hatta, malahan berbagai keputusan mengenai hal-hal penting, diambil hatta dengan penuh pengertian dan persetujuan pada pihak Soekarno.

Masa awal kemerdekaan, kondisi negara Indonesia belum menentu yaitu terbukti Belanda dengan sekutu ingin merebut kembali atas wilayah Indonesia. Maka Wakil Presiden Mohammad Hatta dengan kewenangannya mengambil suatu kebijakan untuk merespon hal tersebut. Penelitian ini bertolak dari teori *Challenge and Responces* dari Arnold J. Toynbe yang menyatakan bahwa “kebudayaan lahir karena tantangan dan jawaban antara manusia dan alam sekitarnya”.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut : *Pertama*, bagaimana Riwayat hidup Mohammad Hatta? *Kedua*, Bagaimana Kebijakan Politik Wakil Presiden Mohammad Hatta pada Masa Revolusi Kemerdekaan RI (1945-1949)?.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang dalam pelaksanaannya melalui empat tahapan yaitu : heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dikemukakan bahwa, Mohammad Hatta, satu dari dua orang proklamator kemerdekaan, dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, lahir pada tanggal 12 Agustus 1902, lahir di Bukittinggi. Ia lahir dari pasangan Muhammad Djamil dan Siti Saleha. Mohammad Hatta meninggal hari Jum'at 14 Maret 1980, di Rumah Sakit Ciptomangkusumo, Jakarta. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia Merdeka, Setelah proklamasi, 18 Agustus, Hatta ditetapkan oleh PPKI sebagai Wakil Presiden, dengan Soekarno sebagai Presiden. Selama beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, suasana di Indonesia masih belum menentu. Pada masa itu Belanda dengan dukungan Sekutu berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya atas wilayah Indonesia. Oleh sebab itu Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan kebijakan politiknya agar menjadi negara Demokrasi, yaitu dengan mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X 16 1945.yang pada garis besarnya berisi tentang berubahnya status KNIP dari pembantu Presiden menjadi lembaga Legislatif. Mohammad Hatta di tunjuk Soekarno menjadi Perdana Menteri merangkap Wakil Presiden pada tahun 1948. Kabinet Hatta terbentuk pada tanggal 29 Januari 1948. Kemudian Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri Mohammad Hatta mengeluarkan kebijakan diantaranya, *pertama* Melanjutkan Perundingan dengan Belanda atas dasar Persetujuan Renville. *Kedua* Kebijakan Rasionalisasi Ke dalam. Kebijakan rasionalisasi ini berdampak pada meletakkan dasar-dasar untuk mengefektifkan susunan angkatan perang. Kebijakan ini tidak terlaksana dengan mulus, karena kondisi politik yang tidak stabil di dalam negeri akibat adanya Agresi Militer Belanda II.